



RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BONE



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107);

20. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD

Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENUTUP**


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 39



RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang tercurahkan dibalik setiap kerja keras kita. Semoga semua sumber daya yang telah tercurahkan dan diberdayakan dapat senantiasa mendapat limpahan rahmat dan ridhonya.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone disusun melalui musyawarah peencanaan pembangunan (Musrembang) melalui tatap muka langsung yang pada akhirnya menghasilkan sebuah Rencana Kerja Sekretariat DPRD sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone. Musrembang mulai dari tingkat Desa Kelurahan hingga Kecamatan sebagai upaya menangkap ide dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan guna membangun sumber daya local yang sifatnya partisipatif. Sebagai panduan dalam menjalankann misi dan pencapaian visi Daerah serta tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan masukan dari segenap pihak yang berkompeten demi perbaikan dan penyempurnaan rencana kerja mi.

Watampone, 25 Juli 2022

SEKRETARIA DPRD
KAB.BONE

SEKRETARIS DPRD BONE


A. ALIMEDDIN M.S.Sos
NIP. 19631014 198410 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Perangkat Daerah Tahun Lalu Capaian Renstra Perangkat Daerah..	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ...	28
3.3 Program Dan Kegiatan	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
- Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kab.Bone
- Tabel 3 Review terhadap rancangan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2023
- Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari pada Para Pemengku Kepentingan Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone
- Tabel 5 Rumusan Rencana dan Kegiatan Tahun 2023 perkiraan maju 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja

Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone 2023 ; a. Berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kab.Bone dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Sekretariat DPRD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah ; c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD ; d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah ; e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2023, Landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 215);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bone yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

20. Peraturan Bupati Bone Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RPKD Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. Bone dalam pelaksanaan urusan pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kab.Bone pada Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kab.Bone adalah sebagai berikut:

1. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Bone Tahun 2023.
2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kab.Bone pada Tahun 2023 sesuai dengan Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu : Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada Tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah : Memuat Rumusan Tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah : Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rincin tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran, beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab. V Penutup : Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut, serta harapan atau Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun perencanaan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi Pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun lalu (2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD Tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD Sekretariat DPRD Kab. Bone. Adapun Pokok evaluasi perangkat Daerah yang dimaksud sebagai berikut :

a. Realisasi Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

a) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

✓ Pengadaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan

✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

✓ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

a) Layanan Administrasi DPRD

✓ Fasilitasi Fraksi DPRD

b. Realisasi Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

✓ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ✓ Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - ✓ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Atau Lapangan
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- ✓ Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - g) Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD
 - ✓ Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - ✓ Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - ✓ Medical Chek Up DPRD
 - h) Layanan Administrasi DPRD
 - ✓ Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - ✓ Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
- a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - ✓ Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - ✓ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - ✓ Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
 - ✓ Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik
 - b) Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - ✓ Pembahasan KUA dan PPAS
 - ✓ Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - ✓ Pembahasan APBD
 - ✓ Pembahasan APBD Perubahan
 - ✓ Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD
 - c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - ✓ Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

- ✓ Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- ✓ Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- ✓ Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

d) Peningkatan Kapasitas DPRD

- ✓ Bimbingan Teknis DPRD
- ✓ Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- ✓ Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- ✓ Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- ✓ Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- ✓ Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- ✓ Pelaksanaan RESES

f) Fasilitasi Tugas DPRD

- ✓ Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

c. Realisasi Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Untuk Tahun 2021 belum ada Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya. Terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan.

Ada beberapa program/kegiatan yang tidak memenuhi target capaian disebabkan adanya pandemic Covid-19 sehingga dilakukann Refokusing kegiatan dan realokasi anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

Program/ kegiatan yang sudah memenuhi target capaian karena adanya sinergitas antara sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD untuk melaksanakan program/ kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan tetap memperhatikan efesiensi anggaran.

- e. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan.

Adapun kebijakan/tindakan perencanaan yaitu dengan melakukan selektifitas dalam menyusun program/ kegiatan dengan memperhatikan prioritas kegiatan setiap program agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat menyentuh kesemua lapisan masyarakat dan mendukung penuh pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Kebijakan anggaran dilakukan dengan memperhatikan volume kegiatan pada setiap program agar tidak ada program/ kegiatan yang mendapatkan anggaran yang berlebihan sehingga program kegiatan dapat terlaksana dengan baik tanpa ada anggaran yang tidak tetap sasaran dan semua target Indikator Kinerja Utama dapat tercapai dengan baik.

Untuk Tabel Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tabel. T-C29) disajikan pada tabel berikut :

Tabel T-C 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2021

PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN BONE

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Capaian KinerjaIndikator Program Teknis Perangkat Daerah	100		100	100	100			
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100		100	100	50			
s4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaan dan Penggaran Perangkat Daerah (dokumen)	22	5	5	5	100	5	15	68,18
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	0	0	0	0	2	2	50,00
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang Dilaksanakan (Dokumen)	4	0	0	0	0	2	2	50,00

4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Dokumen)	26	4	4	4	100	5	13	50,00
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu	100				80			
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (ASN Set. DPRD)	156	39	39	39	100	39	117	75,00
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Realisasi Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan (Laporan)	56	20	12	12	100	12	44	78,57
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi (Laporan)	24	0	0		0	12	12	50,00
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	5	2	2	100	2	9	75,00
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	54	4	18	18	100	18	40	74,07
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja Sekretariat DPRD	100				50			
4	02	01	2.05	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Laporan)	260	65	65	65	100	65	195	75,00
4	02	01	2.05	10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Sekretariat DPRD	120	0	40	0	0	40	40	33,33

4	02	01	2.05	11	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang diikuti oleh Sekertariat DPRD (Kegiatan)	6	0	2	0	0	1	1	16,67
4	02	01	2.05	12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diikuti oleh Sekertariat DPRD (Kegiatan)	4	1	1	1	100	1	3	75,00
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor	100				100			
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30	6	6	6	100	6	18	60,00
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	48	12	12	12	100	12	36	75,00
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48	12	12	12	100	12	36	75,00
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	12	12	12	100	12	36	75,00
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	48	12	12	12	100	12	36	75,00
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Media)	240	48	48	48	100	48	144	60,00
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD (Laporan)	775	155	72	72	100	155	465	60,00
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100				0			

4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang disediakan	5	0	5	-	0	0	0	0,00
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Ketersediaan Jumlah Pengadaan Mebel	30	0	0	-	0	18	18	60,00
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64	0	12	-	0	18	18	28,13
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100				100			
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembayaran Penyediaan Surat Menyurat	48	12	12	12	100	12	36	75,00
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10	3	3	3	100	2	8	80,00
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	464	116	116	116	100	116	348	75,00
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100				71			
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional (unit)	28	7	7	7	100	12	26	92,86
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran Pajak, dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Oprasional (unit)	200	35	35	20	57	50	105	52,50
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara (unit)	800	200	181	50	28	200	450	56,25

4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara (gedung)	24	6	6	6	100	6	18	75,00
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD	Persentase Realisasi Keuangan Kesejahteraan DPRD	100				67			
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Orang/Bulan)	180	45	45	45	100	45	135	75,00
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Atributnya (Set)	180	45	45	45	100	45	135	75,00
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Ketersediaan Medical Check Up yang Dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD (Orang)	135	0	45	0	0	45	45	33,33
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	100				100			
4	02	01	2.16	01	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Rapat Fraksi yang di Fasilitasi Sekretariat DPRD	24	0	6	6	100	6	12	50,00
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48	12	12	12	100	12	36	75,00
4	02	01	2.16	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Penyediaan Bahan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	48	12	12	12	100	12	36	75,00
4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100				99,68			
4	02	02	2,01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100				98			

4	02	02	2,01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	5	1	1	1	100	1	3	60,00
4	02	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi dan Inisiatif (Dokumen)	36	7	9	8	89	9	24	66,67
4	02	02	2,01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan (Laporan)	8	2	2	2	100	2	6	75,00
4	02	02	2,01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik	Jumlah Fasilitasi Pembayaran Jasa Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik (Lembaga)	8	2	2	2	100	2	6	75,00
4	02	02	2,01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tata Tertib DPRD yang Tersusun	4	0	1	1	100	0	1	25,00
4	02	02	2,02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100				100			
4	02	02	2,02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS (Laporan)	8	2	2	2	100	2	6	75,00
4	02	02	2,02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Laporan)	8	2	2	2	100	2	6	75,00
4	02	02	2,02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Kegiatan Pembahasan APBD (Laporan)	8	2	2	2	100	2	6	75,00
4	02	02	2,02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dpkumen Pembahasan APBD Perubahan yang dibahas di DPRD	8	2	2	2	100	2	6	75,00
4	02	02	2,02	06	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Kegiatan Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD (Laporan)	8	2	2	2	100	2	6	75,00

4	02	02	2,03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan oleh Anggota DPRD	100					100			
4	02	02	2,03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum dilakukan Oleh Anggota DPRD dibidang Hukum(Kegiatan)	48	12	12	12	100	12	36	75,00	
4	02	02	2,03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Kunjungan Pengawasan urusan dibidang Infrastruktur (Kegiatan)	48	12	12	12	100	12	36	75,00	
4	02	02	2,03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kunjungan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kegiatan)	48	12	12	12	100	12	36	75,00	
4	02	02	2,03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan dibidang Perekonomian (Kegiatan)	36	0	0	0	0	12	12	33,33	
4	02	02	2,03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	24	12	12	12	100	0	24	100,00	
4	02	02	2,04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100				100				
4	02	02	2,04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD (Kegiatan)	16	4	4	4	100	4	12	75,00	
4	02	02	2,04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Pembayaran Jasa Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Media)	192	48	48	48	100	48	144	75,00	
4	02	02	2,04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Penyediaan Jasa Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Tim Ahli)	20	5	5	5	100	5	15	75,00	
4	02	02	2,04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Jasa Tenaga Ahli Fraksi yang Dibayarkan (orang/bulan)	32	8	8	8	100	8	24	75,00	

4	02	02	2,05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Dilaksanakan Anggota DPRD	100					100			
4	02	02	2,05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilakukan oleh Anggota DPRD (Kegiatan)	336	84	84	70	83	84	238	70,83	
4	02	02	2,05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Kegiatan)	18	3	3	3	100	5	11	61,11	
4	02	02	2,05	03	Pelaksanaan RESES	Jumlah Pelaksanaan RESES dilakukan Oleh Anggota DPRD (Kegiatan)	12	3	3	3	100	3	9	75,00	
4	02	02	2,08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas-Tugas DPRD	100				100				
4	02	02	2,08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD (Kegiatan)	48	12	12	12	100	12	36	75,00	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dapat diukur melalui Indikator Kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD
2. Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Antara Eksekutif DPRD Menunjang Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone tahun 2022, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2021 terdapat target Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah dapat dicapai dengan baik (memenuhi target yang ditetapkan).

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Indeks Kepuasan Pelayana Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	72%	73%	74%	75%	80	85	100	100	
2	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh DPRD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	
3	Persentase Memfasilitasi Ranperda	-	-	100%	100%	100%	100%	66,66	78	100	100	
4	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	-	-	B	B	BB	BB	B	BB	BB	BB	

Laporan LKjIP Tahun 2021

Adapun Analisi Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2021 sebagai berikut :

- Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dinilai melalui kuosioser yang disebarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Halnya disebabkan karena adanya sinergitas antara pimpinan dan seluruh ASN yang ada dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Dan seluruh ASN yang ada dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Bone diarahkan untuk selalu meningkatkan potensi diri dengan mengikuti bimtek atau pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindak lanjuti oleh DPRD, Aspirasi masyarakat yang masuk pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone tahun 2021 sebanyak 20 Aspirasi dan semua aspirasi yang masuk dapat ditindak lanjuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone. hal ini disebabkan karena adanya sinergitas antara Sekretariat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menindaklanjuti dan mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat.
- Persentase Memfasilitasi Ranperda, terlearisasi pada tahun 2021 sebanyak 7 Ranperda dari target 9 ranperda atau sebesar 78%. Salah satu penyebab karena adanya Ranperda RTRW masi menunggu hasil pembahasan Lintas Sektor dan Kementarian ATR dan juga menunggu persetujuan Substansi dari Kementerian ATR yang sampai saat unbu belum keluar. Ranperda RTRW Provinsi juga belum ditetapkan yang sejatinya juga menjadi salah satu regulasi yang harus dipedomani.
- Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP untuk nilai sakip Sekretariat DPRD kabupate Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari target B menjadi BB melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya komitmen seluruh personil Sekretariat DPRD Kab.bone untuk meningkatkan sumberdaya aparatur dengan mengikuti diklat/bimtek sosialisasi dan lainnya, meningkatkan penyediaan perlengkapan administrasi perkantor.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2021 mencapai target realisasi anggaran sebesar 94,79% tetapi untuk penyerapan anggaran pertriulan tidak merata, dan tertumpuh pada akhir tahun anggaran namun pada akhirnya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program di dalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja.

2. Permasalahan dan hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan terhadap kerja-kerja dewan.
2. Belum optimalnya penyimpanan, pengelolaan data, dan pelayanan administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
3. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan perbagian pada Sekretariat DPRD masih kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.
5. Dinamika Politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
6. Masih banyaknya agenda AKD yang saling berbenturan dikarenakan adanya anggota DPRD yang menduduki lebih dari 1 AKD, sehingga terkadang agenda kerja antar AKD harus saling menunggu, dan berpengaruh pada proses administrasi Sekretariat DPRD.
7. Belum optimalnya beberapa bagian/ bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikarenakan tidak/ belum tersedianya bahan/ alat/ anggaran dalam menunjang tupoksi Sekretariat DPRD.

3. Tantangan dan Peluang

a. Tantangan

Tantangan atau ancaman datang dari luar Sekretariat DPRD yang akan berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya.

Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD
- 2) Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
- 3) Agenda reformasi terus bergulir dan salah satu dampaknya adalah tuntutan aspirasi masyarakat semakin kritis dan beragam yang mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin berkurang. Ini semua merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya para Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

b. Peluang

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam mencapai Visi dan Misinya diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan Teknologi Informasi yang semakin berkembang.
- 2) Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD.
- 3) Mengadakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
- 4) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang terampil sesuai dengan bidangnya tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- 5) Tuntutan permintaan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dari DPRD, merupakan peluang bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengembangkan kemampuannya agar dapat memenuhi permintaan tersebut;
- 6) Kondisi Keamanan di daerah yang relatif stabil bila dibandingkan dengan daerah lain, akan memberikan pengaruh bagi berkembangnya pelaksanaan administrasi pemerintahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan – kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2022.

Review terhadap rancangan akhir Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2023 dimuat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
					41.944.244.820					55.261.956.420	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				29.246.967.260	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				33.466.288.070	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kel. Bulu Tempe Kec. TR. Barat Kab. Bone	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		119.814.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kel. Bulu Tempe Kec. TR. Barat Kab. Bone	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		167.721.793	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	32.682.920	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	53.926.818	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.631.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	9.946.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.444.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	11.277.875	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	74.056.480	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	92.570.600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Bulu Tempe Kec. TR. Barat Kab. Bone	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu		2.717.920.280	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kel. Bulu Tempe Kec. TR. Barat Kab. Bone	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu		4.008.364.954	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	2.507.844.430	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	3.636.374.424	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bone	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.374.890	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	21.562.335	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	36.650.200	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	43.980.240	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	112.436.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	224.873.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	18 Laporan	46.614.260	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	18 Laporan	81.574.955	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kel. Bulu Tempe Kec. TR. Barat Kab. Bone	Persentase Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja Sekretariat DPRD		261.298.350	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja Sekretariat DPRD		671.529.203	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	47 Paket	18.588.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kel. Bulu Tempe Kec. TR. Barat Kab. Bone	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	47 Paket	31.599.600	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	85 Orang	167.190.350	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	85 Orang	526.649.603	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diikuti Oleh Sekretariat DPRD	3 Kegiatan	75.520.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diikuti Oleh Sekretariat DPRD	3 Kegiatan	113.280.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Bulu Tempe Kec. TR. Barat Kab. Bone	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor		2.281.498.540	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor		3.329.215.665	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	65.409.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Bulu Tempe Kec. TR. Barat Kab. Bone	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	78.491.280	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	78.222.850	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	93.867.420	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	89.630.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	112.038.125	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	169.283.840	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	211.604.800	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah PAKet Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	113.885.950	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah PAKet Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	136.663.140	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	600 Dokumen	539.520.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	600 Dokumen	674.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155 Laporan	1.225.546.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155 Laporan	2.022.150.900	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel. Bulu Tempe Kec. TR. Barat Kab. Bone	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		839.483.030	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel. Bulu Tempe Kec. TR. Barat Kab. Bone	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		899.504.188	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	513.850.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	513.850.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	33.892.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	33.892.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	14 unit	51.656.400	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	14 unit	51.656.400	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	25 unit	240.084.630	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	25 unit	300.105.788	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Bulu Tempe Kec. TR. Barat Kab. Bone	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.232.664.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Bulu Tempe Kec. TR. Barat Kab. Bone	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.306.947.950	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	297.135.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	371.418.750	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	924.029.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	924.029.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel. Bulu Tempe	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		859.251.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kel. Bulu Tempe Kec.	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.000.639.420	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Kec. TR. Bara t Kab. Bone	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 unit	365.220.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	TR. Barat Kab. Bone	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 unit	383.481.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	35 unit	167.560.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	35 unit	167.560.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	161 unit	105.150.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	161 unit	184.012.500	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	221.321.600	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	265.585.920	
	Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD	Kel. Bulu Tem pe Kec. TR. Bara t Kab. Bone	Persentase Realisasi Keuangan Kesejahteraan DPRD		19.786.512.400	Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD	Kel. Bulu Tempe Kec. TR. Barat Kab. Bone	Persentase Realisasi Keuangan Kesejahteraan DPRD		20.815.646.145	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/bulan	19.521.124.900	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/bulan	20.497.181.145	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	135 Set	191.137.500	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	135 Set	229.365.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	74.250.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	89.100.000	
	Layanan Administrasi DPRD	Kel. Bulu Tem pe Kec. TR. Bara t Kab. Bone	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		1.148.523.960	Layanan Administrasi DPRD	Kel. Bulu Tempe Kec. TR. Barat Kab. Bone	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		1.266.718.752	
	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	6 Laporan	12.150.000	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	6 Laporan	12.150.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	545.400.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	545.400.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	590.973.960	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	709.168.752	
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		12.697.277.560	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		21.795.668.350	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kel. Bulu Tem pe Kec. TR. Bara t	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		319.466.230	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kel. Bulu Tempe Kec. TR. Barat Kab. Bone	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		319.466.230	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7 Dokumen	75.889.200	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7 Dokumen	75.889.200	

	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Bone	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dokumen	67.900.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dokumen	67.900.000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	7 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	7 Dokumen	50.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik yang difasilitasi	2 Dokumen	125.677.030	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik yang difasilitasi	2 Dokumen	125.677.030	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		127.964.050	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		131.352.250	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Kel. Bulu Tempe Kec. TR. Barat Kab. Bone	Jumlah Laporan Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	2 Laporan	22.588.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kel. Bulu Tempe Kec. TR. Barat Kab. Bone	Jumlah Laporan Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	2 Laporan	25.976.200	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	18.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	18.000.000	
	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	45.076.050	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	45.076.050	
	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	22.500.000	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	22.500.000	
	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	1 Dokumen	19.800.000	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	1 Dokumen	19.800.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan oleh Anggota DPRD		619.200.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan oleh Anggota DPRD		619.200.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab.Bone Semua Kecamatan, dan Semua Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	154.800.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab.Bone Semua Kecamatan, dan Semua Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	154.800.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	154.800.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	154.800.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	154.800.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	154.800.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	154.800.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	154.800.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab.Bone	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD		1.356.356.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab.Bone Kec.	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD		2.478.712.000	

	Pendalaman Tugas DPRD	Kec. TR.	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12 Dokumen	848.856.000	Pendalaman Tugas DPRD	TR. Barat, dan Kel. Bulu Tempe	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12 Dokumen	1.697.712.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Barat, dan Kel. Bulu Temp e	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	273.500.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	547.000.000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 Orang	90.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 Orang	90.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	144.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	144.000.000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Bone, Luar Kabup aten dan Luar Provin si	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Dilaksanakan Anggota DPRD		9.710.811.280	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Bone, Luar Kabupat en dan Luar Provinsi	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Dilaksanakan Anggota DPRD		17.119.977.870	
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilakukan oleh Anggota DPRD	84 Kegiatan	6.503.366.000	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilakukan oleh Anggota DPRD	84 Kegiatan	13.006.732.000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	5 Kegiatan	188.109.980	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	5 Kegiatan	188.109.980	
	Pelaksanaan RESES		Jumlah Pelaksanaan RESES dilakukan oleh Anggota DPRD	3 Kegiatan	3.019.335.300	Pelaksanaan RESES		Jumlah Pelaksanaan RESES dilakukan oleh Anggota DPRD	3 Kegiatan	3.925.135.890	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Kabup aten Bone, Luar Kabup aten dan Luar Provin si	Persentase Pelaksanaan Tugas- Tugas DPRD		563.480.000	Fasilitasi Tugas DPRD	Kabupat en Bone, Luar Kabupat en dan Luar Provinsi	Persentase Pelaksanaan Tugas- Tugas DPRD		1.126.960.000	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	563.480.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	1.126.960.000	

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Renstra DPR RI dan dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi antara Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dengan Renstra DPR RI sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing.

3.3.1 Telaahan Renstra DPR RI

Adapun Renstra DPR RI memuat Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi : **“Terwujudnya DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan yang modern berwibawa dan kredibel”**

Misi DPR RI adalah :

1. Menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat; dan
2. Memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah.

dengan pemaknaan sebagai berikut :

1. **Menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk pembangunan nasional adalah** membangun dan memperkuat tata kelola dalam pembentukan Undang-Undang, meningkatkan akuntabilitas dan ketepatan alokasi anggaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan membangun keterbukaan akses masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan Undang-Undang, kebijakan pemerintah, dan penggunaan keuangan negara sehingga

DPR – RI kredibel di mata masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya, dan dunia internasional.

2. Memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah adalah membangun lembaga perwakilan yang kuat sebagai penyeimbang pemerintah melalui pembentukan tata kelola DPR-RI berdasarkan praktik terbaik serta didukung oleh dukungan administrasi, teknis, dan keahlian dari unsur penunjang sehingga DPR-RI menjadi kredibel di mata masyarakat, Pemerintah, lembaga negara lainnya, dan dunia internasional.

Rencana Strategis DPR RI 2015-2019 diarahkan pada pencapaian tujuan pokok sebagai berikut :

a. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan yang mendukung pembangunan.

DPR RI memiliki tiga fungsi pokok, yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran, dan fungsi Pengawasan. Ketiga fungsi itu sangat penting dalam penentuan kinerja DPR RI untuk melakukan pembangunan negara sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia. Fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR RI akan berpengaruh besar dalam pembuatan Undang-Undang, Undang-Undang yang telah dibuat dan disetujui oleh DPR RI dan Presiden akan langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut akan menentukan nasib pembangunan bangsa Indonesia atau pembangunan nasional akan dipengaruhi oleh Undang-Undang yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Begitu juga fasilitas negara yang dibangun dalam rangka

menunjang pembangunan negara dalam bidang-bidang tertentu didasari oleh Undang-Undang yang dibuat oleh DPR RI melalui fungsi legislasinya. Dengan demikian DPR RI akan membuat kebijakan melalui pembentukan Undang-Undang yang sangat diperlukan oleh rakyat Indonesia dan dapat menunjang kinerja pemerintah untuk pembangunan nasional.

Setelah penetapan Undang-Undang diperlukan biaya untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, selain membuat produk perundang-undangan, DPR RI juga berfungsi menyusun anggaran negara. DPR RI bersama Presiden menyusun anggaran dalam RAPBN yang akan diajukan Undang-Undang tentang APBN. APBN itu akan bersentuhan langsung dengan pembangunan negara sehingga menjadi motor bagi kegiatan pembangunan. Keinginan pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional harus didukung oleh DPR RI yang mempunyai fungsi anggaran dengan menyusun alokasi anggaran yang dibutuhkan. Alokasi anggaran itu selanjutnya akan disalurkan kepada badan/lembaga yang bertugas khusus untuk melakukan pembangunan nasional, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan. Untuk itu, DPR RI secara bijaksana akan menentukan anggaran yang betul-betul dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi ketiga yang dimiliki DPR RI. Fungsi itu akan dijalankan apabila fungsi legislasi dan fungsi anggaran telah dilaksanakan sebelumnya. Fungsi pengawasan berperan sebagai kontrol agar pelaksanaan Undang-Undang, penggunaan keuangan

keuangan negara, dan kebijakan Pemerintah tidak salah arah, untuk menjalankan fungsi itu, DPR RI mempunyai tiga hak khusus yang dapat digunakan, yaitu hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Dengan hak-hak tersebut DPR RI dapat mengontrol semua kebijakan Pemerintah dan implemetasinya. Pada akhirnya fungsi pengawasan inilah yang menentukan apakah pembangunan bangsa dan negara Indonesia berlangsung sesuai atau tidak dengan keinginan atau cita-cita luhur bangsa Indonesia.

b. Mewujudkan kelembagaan DPR-RI yang kuat diiringi oleh dukungan administratif, teknis, dan keahlian unsur penunjang yang Professional.

Kedudukan fungsi DPR RI yang semakin kuat telah membuat peran DPR RI semakin penting dalam penyelenggaraan negara. DPR RI memiliki peran sentral dalam pembentukan produk hukum melalui fungsi legislasi yang dimiliki. DPR RI juga berperan menentukan kebijakan pembangunan melalui fungsi anggaran yang dimiliki sekaligus mengawasi kinerja Pemerintahan. Oleh karena itu, DPR RI menjadi wakil rakyat dalam pembentukan produk hukum dan kebijakan serta pengawasannya.

Keberadaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan dipengaruhi oleh dua unsur utama. Pertama, DPR RI sebagai lembaga terdiri atas Anggota DPR RI, AKD, dan fraksi. Kedua, unsur pendukung yang memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian. DPR RI sebagai lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya perlu didukung dengan tata

kelola parlemen yang baik atau praktik terbaik dalam penyelenggaraan parlemen sebagai bentuk kewenangannya. Untuk itu, DPR RI perlu didukung oleh AKD yang berkinerja tinggi dan disertai dengan perilaku anggota DPR RI yang berintegritas.

Untuk memperkuat reputasi DPR RI dalam pergaulan parlemen di dunia dan dalam kerangka diplomasi internasional sesuai dengan lingkupnya, perlu didukung tata kelola kerja sama antar parlemen, baik bilateral, regional, maupun internasional yang semakin baik. Selain itu, harus didukung pula Sumber Daya Manusia dari organisasi penunjang yang memberikan dukungan administrasi, teknis, dan keahlian yang berkualitas disertai dengan integritas dan kinerja tinggi serta penerapan tata kelola terbaik.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2015-2019 adalah :

1. Menghasilkan produk Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan yang mendukung proses Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang
2. Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang Kuat.
3. Mewujudkan pemahaman masyarakat yang objektif tentang DPR RI.
4. Mewujudkan Sekretariat Jenderal yang professional.
5. Memperkuat pengawasan internal.

Rencana strategis DPR RI 2015-2019 menjadi faktor pendorong dalam peningkatan pelayanan Sekretariat kepada DPRD Kabupaten Bone dalam menjalankan fungsinya, meliputi: (1) Fungsi legislasi DPRD guna menjamin kepastian hukum bagi rakyat dalam menjalankan kehidupannya

melalui pembentukan produk hukum yang berkualitas; (2) Fungsi anggaran DPRD Kabupaten Bone untuk mendukung kebijakan penganggaran pembangunan daerah dan kebijakan anggaran DPRD yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel; dan (3) Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bone untuk menyelenggarakan tugas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi aspirasi rakyat. Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone perlu didorong untuk meningkatkan pelayanan kepada DPRD.

3.3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah : “ **Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**”. Ini merupakan pilar utama pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2021 seharusnya menjadi acuan dalam menjabarkan berbagai sektor pembangunan daerah termasuk pembangunan. Hal ini pula diharapkan menjadi acuan dan kontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia dalam mewujudkan kualitas manusia ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan.

a. Visi

“ **Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**”

Pada rumusan visi tersebut, terdapat penjelasan operasional sebagai berikut :

1. **Inovatif** adalah Kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. **Produktif** adalah Kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. **Kompetitif** adalah Kemampuan menghasilkan SDM, Produk Barang, dan Jasa yang mampu terserap oleh pasar.
4. **Inklusif** adalah Kondisi system dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat tanpa kecuali.
5. **Berkarakter** adalah Spirit Pemabnguan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi yang adakan dijalankan Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Insfrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

5. Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produksi Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.

Semestara itu, misi dalam RPJMD ini dimaksud sebagai upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya visi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 dari kelima misi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait langsung yang terkait langsung dengan urusan wajib Sekretariat DPRD adalah misi pertama yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan Inovatif, dengan sasaran adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD, meningkatkan aspirasi masyarakat yang terakomodir unsur pimpinan dan anggota DPRD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu satu tahun kedepan tahun 2023. Dengan berpodeman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan. Maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan yang mendukung pencapaian tujuan sasaran Renstra, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD.
2. Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Antara Eksekutif DPRD Menunjang Penyerapan Aspirasi Masyarakat.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yakni hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur pimpinan dan anggota DPRD.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Tahun					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Eksekutif dengan DPRD yang Menunjang Penyerapan Aspirasi Masyarakat	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	70%	71%	72%	73%	74%	75%
		2	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	2	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				3	Persentase Memfasilitasi Ranperda	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD	3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	4	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	B	B	BB	BB

3.3 Program dan Kegiatan

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun program dan kegiatan Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Bone merencanakan 2 (Dua) Program yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd**

Dari 2 (Dua) Program tersebut di implementasikan melalui 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 56 (Lima Puluh Enam) Sub Kegiatan. Agar Program dan Kegiatan yang telah ditentukan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasarannya maka perlu ditetapkan indikator kinerja dan sasaran yang ingin dicapai dan disertai dengan dana indikatif yang dibutuhkan. Indikator kinerja dan kelompok sasaran serta dana indikatif program dan kegiatan tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone sebagai berikut :

TABEL T.C 32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000)
-1					-2		-3	-5	-6
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4	2				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				41.944.244.828
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. TR. Barat	Jumlah Capaian Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (%)	100%	29.246.967.268
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	119.814.900
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun	2	32.682.920
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. TR. Barat	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	6.631.000
4	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. TR. Barat	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	6.444.500
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. TR. Barat	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	2	74.056.480
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	2.717.920.280,00
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. TR. Barat	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	40	2.507.844.430,00
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. TR. Barat	Jumlah realisasi pelaksanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	14.374.890,00
4	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. TR. Barat	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	36.650.200,00
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. TR. Barat	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	112.436.500,00
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. TR. Barat	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD	18	46.614.260,00
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100%	261.298.350,00

4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. TR. Barat	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	47	18.588.000,00
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. TR. Barat	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	85	167.190.350,00
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. TR. Barat	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3	75.520.000,00
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	2.281.498.540,00
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. TR. Barat	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6	65.409.400,00
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. TR. Barat	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	78.222.850,00
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. TR. Barat	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan pimpinan DPRD	12	89.630.500,00
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. TR. Barat	Jumlah bahan penyediaan bahan logistik kantor	12	169.283.840,00
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. TR. Barat	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	113.885.950,00
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. TR. Barat	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	600	539.520.000,00
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. TR. Barat	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD	155	1.225.546.000,00
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	839.483.030,00
4	2	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. TR. Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	513.850.000,00
4	2	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kec. TR. Barat	Jumlah Unit Kendaraan Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	33.892.000,00
4	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Kec. TR. Barat	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	14	51.656.400,00
4	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. TR. Barat	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	25	240.084.630,00
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.232.664.200,00
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. TR. Barat	Jumlah pembayaran penyediaan surat menyurat	12	11.500.000,00
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. TR. Barat	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	297.135.000,00
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. TR. Barat	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12	924.029.200,00

4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	859.251.600,00
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. TR. Barat	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan pajak kendaraan dinas operasional	30	365.220.000,00
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. TR. Barat	Jumlah pembayaran pajak, pemeliharaan kendaraan dinas operasional DPRD	35	167.560.000,00
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. TR. Barat	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	161	105.150.000,00
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. TR. Barat	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	6	221.321.600,00
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	19.786.512.408,00
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan dan hak-hak keuangan anggota DPRD Kab. Bone	45	19.521.124.908,00
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD beserta atributnya	135	191.137.500,00
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kec. TR. Barat	Ketersediaan Medical Check Up yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	45	74.250.000,00
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	100%	1.148.523.960,00
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah Rapat Fraksi yang Difasilitasi Sekretariat DPRD	6	12.150.000,00
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	545.400.000,00
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah persediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	12	590.973.960,00
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah Capaian realisasi kegiatan perangkat daerah (%)	100%	12.697.277.560,00
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	319.466.230,00
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah penyusunan peraturan daerah dan peraturan DPRD yang tersusun	7	75.889.200,00
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	7	67.900.000,00
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kec. TR. Barat	Jumlah rapat kajian perundang-undangan	7	50.000.000,00
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kec. TR. Barat	Jumlah penyusunan, kajian dan naskah akademik peraturan daerah	2	125.677.030,00

4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kec. TR. Barat	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	127.964.050,00
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Kec. TR. Barat	Jumlah kegiatan pembahasan pembahasan KUA PPAS	2	22.588.000,00
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kec. TR. Barat	Jumlah kegiatan pembahasan KUA PPAS	1	18.000.000,00
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Kec. TR. Barat	Jumlah kegiatan pembahasan APBD	1	45.076.050,00
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Kec. TR. Barat	Jumlah kegiatan pembahasan perubahan APBD	1	22.500.000,00
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kec. TR. Barat	Jumlah pembahasan pertanggungjawaban APBD	1	19.800.000,00
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kec. TR. Barat	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	619.200.000,00
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kec. TR. Barat	Jumlah kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	12	154.800.000,00
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kec. TR. Barat	Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan di Bidang Infrastruktur	12	154.800.000,00
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kec. TR. Barat	Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan di Bidang Infrastruktur	12	154.800.000,00
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kec. TR. Barat	Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan di Bidang Perekonomian	12	154.800.000,00
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	1.356.356.000,00
4	2	2	2.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis oleh pimpinan dan anggota DPRD	12	848.856.000,00
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kec. TR. Barat	Jumlah kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	12	273.500.000,00
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kec. TR. Barat	Jumlah pembayaran jasa kelompok pakar dan tim ahli	5	90.000.000,00
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kec. TR. Barat	Jumlah pembayaran jasa tenaga ahli tim fraksi anggota DPRD	8	144.000.000,00
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kec. TR. Barat	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	9.710.811.280,00
4	2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah pelaksanaan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	84	6.503.366.000,00
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah penyusunan pokok-pokok pikiran	5	188.109.980,00
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Kec. TR. Barat	Jumlah cakupan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	3	3.019.335.300,00
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	100%	563.480.000,00
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	12	563.480.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan Program dan Kegiatan untuk Tahun 2023, menyesuaikan antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, menurut rancangan awal Renstra dan RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan prioritas Nasional.

Program dan Kegiatan merupakan strategis organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan. Program dan Kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan.

Untuk tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Bone merencanakan 2 Program dan dijabarkan menjadi 15 (lima belas) Kegiatan dan dijabarkan dalam 56 Sub Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan disajikan dalam Tabel T.C 13 pada halaman berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	02				SEKRETARIAT DPRD								41,944,244,828				236,874,168,000	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								29,246,967,268				209,024,000,000	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								119,814,900				83,132,500,000	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	32,682,920	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	385,000,000
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	6,631,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	82,500,000,000
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	6,444,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	82,500,000
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	74,056,480	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	165,000,000
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,717,920,280				5,258,000,000	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	40 Orang/bulan	100 Persen	2,507,844,430	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	4,290,000,000
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	14,374,890	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	198,000,000
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	36,650,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	110,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	112,436,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	330,000,000
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	18 Laporan	100 Persen	46,614,260	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	330,000,000
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								261,298,350			1,023,000,000		
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja Pada Sekretariat DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	47 Paket	100 Persen	18,588,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	88,000,000
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja Pada Sekretariat DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	85 Orang	100 Persen	167,190,350	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	385,000,000
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Inplementasi Peraturan Perundang-Undangan yang Diikuti Oleh Sekretariat DPRD	Persentase Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja Pada Sekretariat DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	3 kegiatan	100 Persen	75,520,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	550,000,000
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,281,498,540			5,324,500,000		
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	6 Paket	100 Persen	65,409,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	82,500,000
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	12 Paket	100 Persen	78,222,850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	165,000,000
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	12 Paket	100 Persen	89,630,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	77,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	12 Paket	100 Persen	169,283,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	600,000,000
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	12 Paket	100 Persen	113,885,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	110,000,000
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	600 Dokumen	100 Persen	539,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	990,000,000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Kantor	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	155 Laporan	100 Persen	1,225,546,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	3,300,000,000
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								839,483,030	85,890,000,000				
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	1 Unit	100 Persen	513,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	2,750,000,000
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	1 Unit	100 Persen	33,892,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	82,500,000,000
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	14 Unit	100 Persen	51,656,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	200,000,000
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	25 Unit	100 Persen	240,084,630	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	440,000,000
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,232,664,200	3,190,000,000				
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	11,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	660,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	297,135,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	550,000,000
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	924,029,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	1,980,000,000
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								859,251,600			1,578,500,000		
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	30 Unit	100 Persen	365,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	935,000,000
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	35 Unit	100 Persen	167,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	38,500,000
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	161 Unit	100 Persen	105,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	275,000,000
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	6 Unit	100 Persen	221,321,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	330,000,000
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								19,786,512,408			22,164,500,000		
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Persentase realisasi keuangan dan kesejahteraan DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	45 Orang/Bulan	100 Persen	19,521,124,908	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	21,780,000,000
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Persentase realisasi keuangan dan kesejahteraan DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	135 Set	100 Persen	191,137,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	302,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Persentase realisasi keuangan dan kesejahteraan DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	45 Orang	100 Persen	74,250,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	82,500,000
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD							1,148,523,960	1,463,000,000					
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	persentase kegiatan layanan Administrasi DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	6 Laporan	100 Persen	12,150,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	33,000,000
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	persentase kegiatan layanan Administrasi DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	545,400,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	880,000,000
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	persentase kegiatan layanan Administrasi DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	12 Paket	100 Persen	590,973,960	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	550,000,000
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							12,697,277,560	27,850,168,000					
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							319,466,230	423,720,000					
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	7 Dokumen	100 Persen	75,889,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	71,500,000
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	7 Dokumen	100 Persen	67,900,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	66,220,000
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	7 Dokumen	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	110,000,000
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	125,677,030	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	176,000,000
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran							127,964,050	264,000,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Laporan Kegiatan Pembahasan KUA Dan PPAS	Persentase Kegiatan Pembahsan Kebijakan Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	22,588,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	38,500,000
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Kegiatan Pembahsan Kebijakan Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	38,500,000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Persentase Kegiatan Pembahsan Kebijakan Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	45,076,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	88,000,000
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Kegiatan Pembahsan Kebijakan Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	38,500,000
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Kegiatan Pembahsan Kebijakan Anggaran	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	19,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	60,500,000
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								619,200,000	1,342,000,000				
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan oleh Anggota DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	154,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	352,000,000
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan oleh Anggota DPRD	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	154,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	330,000,000
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan oleh Anggota DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	154,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	330,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan oleh Anggota DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	154,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	330,000,000
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								1,356,356,000			5,357,000,000		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	848,856,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	4,400,000,000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	273,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	660,000,000
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Orang	100 Persen	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	132,000,000
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	8 Orang	100 Persen	144,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	165,000,000
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								9,710,811,280			17,713,448,000		
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD	Persentase Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Dilaksanakan Anggota DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	84 kegiatan	100 Persen	6,503,366,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	12,993,448,000
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD	Persentase Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Dilaksanakan Anggota DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	5 kegiatan	100 Persen	188,109,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	220,000,000
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Pelaksanaan Reses Dilakukan Oleh Anggota DPRD	Persentase Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Dilaksanakan Anggota DPRD	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Bulu Tempe	100 Persen	3 kegiatan	100 Persen	3,019,335,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	4,500,000,000
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD								563,480,000			2,750,000,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas-Tugas DPRD	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	563,480,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100 Persen	2,750,000,000
TOTAL													41,944,244,828	236,874,168,000				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) pembangunan daerah tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2023, yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja (Renja) merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai kewenangan yang diemban Sekretariat DPRD sebagai salah satu perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bone. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kab.Bone Tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, sehingga dapat tercapai tujuan Pembangunan daerah Tahun 2023.

Atas Bantuan berbagai pihak hingga selesainya rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 ini diucapkan terima kasih.

CASCADING KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KAB. BONE

VISI-MISI KAB.BONE 2018-2023	MASYARAKAT KAB. BONE YANG MABESSA (MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA)			
MISI RPJMD KAB.BONE	M 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)			
TUJUAN RPJMD KAB. BONE 2018-2023	Tujuan 1 : Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari KKN			
TUJUAN RENSTRA	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD	Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Antara Eksekutif DPRD Menunjang Penyerapan Aspirasi Masyarakat		
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	
INDIKATOR SASARAN	1. Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	2. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3. Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindak Lanjuti Oleh DPRD	4. Persentase Memfasilitasi Ranperda
PENANGGUNG JAWAB SASARAN RENSTRA	SEKRETARIS DPRD			
PROGRAM	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, Pendalaman dan Fasilitasi Tugas DPRD	Cakupan Realisasi Pelaksanaan Pengawasan, Pembahasan Kebijakan Anggaran dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	

UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	BAGIAN KEUANGAN	BAGIAN UMUM					BAGIAN KEUANGAN	BAGIAN UMUM	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN			BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
---	-----------------	-------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	---	--	--	---	--	--

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD	Layanan Administrasi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pembahasan Kebijakan Anggaran
SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Realisasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Tugas-Tugas DPRD yang di Fasilitasi Sekretariat DPRD	Terlaksananya Tugas-Tugas DPRD yang di Fasilitasi Sekretariat DPRD	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan Anggota DPRD	Terlaksananya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
INDIKATOR KEGIATAN	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas-Tugas DPRD yang di Fasilitasi Sekretariat DPRD	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan Oleh Anggota DPRD	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan Anggota DPRD	Persentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	BAGIAN KEUANGAN	BAGIAN UMUM					BAGIAN KEUANGAN	BAGIAN UMUM	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN			BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
--	-----------------	-------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	---	--	--	---	--	--

SUB 1 KEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pendalaman Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pembahasan KUA dan PPAS	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
----------------	---	---	--	---	--------------------------------	---	--	------------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	------------------------------	--

SASARAN SUB KEGIATAN	Tersedian ya dokumen perencana aan kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Laporan Pembayaran Penyediaan Surat Menyurat	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksanany a Rapat Fraksi yang di Fasilitas Sekretariat DPRD	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilakukan oleh Anggota DPRD	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum dilakukan Oleh Anggota DPRD dibidang Hukum
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencana n dan Penggara n Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pembayaran Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Rapat Fraksi yang di Fasilitas Sekretariat DPRD	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilakukan oleh Anggota DPRD	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum dilakukan Oleh Anggota DPRD dibidang Hukum
SUB 2 KEGIATAN	Koordinas i dan Penyusun a n dokumen RKA-SKPD	Pengadaa n pakaian dinas beserta atribut kelengkapanny a	Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan pemeliharaan dan pajak kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
SASARAN SUB KEGIATAN	Tersedian ya Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya untuk aparat	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Pajak, dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Oprasional Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Atributnya	Terlaksanany a Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi dan Inisiatif	Terlaksananya Pembayaran Jasa Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya Kegiatan Kunjungan Pengawasan urusan dibidang Infrastruktur	

INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Pajak, dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Oprasional Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Atributnya	Jumlah Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi dan Inisiatif	Jumlah Pembayaran Jasa Publikasi dan Dokumentasi Dewan
SUB 3 KEGIATAN	Koordinasi & Penyusunan Dokumen DKA - SKPD	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengadaan meubel	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
SASARAN SUB KEGIATAN	Tersedianya Dokumen DKA-SKPD Perangkat Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pembayaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Medical Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Penyediaan Bahan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Tersedianya Jasa Kelompok Pakar dan Tim Ahli
INDIKATOR SUB KEGIATAN 3	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA-SKPD yang tersusun	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ketersediaan Jumlah Pengadaan Mebeleur	Jumlah Laporan Pembayaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Penyediaan Bahan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Jasa Kelompok Pakar dan Tim Ahli
SUB 4 KEGIATAN	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan logistik kantor	Pengadaan perlatan dan mesin lainnya			Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik
SASARAN SUB KEGIATAN	Tersusunnya laporan capaian kinerja & ikhtisar	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor			Terlaksananya Fasilitasi Pembayaran Jasa Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik

Jumlah Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Kunjungan Pengawasan urusan dibidang Infrastruktur
Pembahasan APBD	Pelaksanaan RESES	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Kegiatan Pembahasan APBD	Terlaksananya Kegiatan RESES	Terlaksananya Kunjungan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Pelaksanaan RESES dilakukan Oleh Anggota DPRD	Jumlah Kunjungan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Pembahasan APBD Perubahan		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Terlaksananya Dokumen Pembahasan APBD Perubahan yang dibahas di DPRD		Terlaksananya Kunjungan Pengawasan Urusan dibidang Perekonomian

INDIKATOR SUB KEGIATAN 4	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Tersusun	Jumlah Pelaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
--------------------------	---	--	---	--

SUB 5 KEGIATAN			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pengadaan sarana & prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya
SASARAN SUB KEGIATAN			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terdesainya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
INDIKATOR SUB KEGIATAN 5			Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia

SUB 6 KEGIATAN			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
SASARAN SUB KEGIATAN			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
INDIKATOR SUB KEGIATAN 6			Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	

Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara

Jumlah Fasilitas Pembayaran Jasa Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik	Jumlah Jasa Tenaga Ahli Fraksi yang Dibayarkan
--	--

Jumlah Dokumen Pembahasan APBD Perubahan yang dibahas di DPRD

Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan dibidang Perekonomian
--

Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD
Terlaksananya Kegiatan Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD
Jumlah Kegiatan Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD
Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD

UNIT KERJA PENANGGUN G JAWAB SUB KEGIATAN	SUB KOORDIN ATOR PERENCA NAAN DAN PENGAN GGABAN	KASUBANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KASUBAG RUMAH TANGGA	KASUBANG PERLENGKAPAN	KASUBAG RUMAH TANGGA	KASUBAG PERLENGKAPAN	SUB KOORDINATOR AKUNTANSI DAN PELAPORAN	KASUBAG RUMAH TANGGA	SUB KOORDINATOR KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	SUB KOORDINATOR PERSIDANGAN DAN RISALAH	SUB KOORDINATOR, HUMAS, PROTOKOL DAN PUBLIKASI	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN	SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN ASPIRASI	SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGAWASAN
--	--	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--	----------------------------	--	--	--	---	---	---